

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

AMAN, World Agroforestry Centre (ICRAF), Forest People Programme (FPP). 2003. *Satu Yang Kami Tuntut: Pengakuan*.

Bogor.Indonesia.

Ahmad Redi. 2014. *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*.

Sinar Grafika: Jakarta

Amiruddin & Zainal Asikin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.

Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo

Persada: Jakarta.

C.F Storg. *Kontitusi-Konstitusi Politik Modern*.Bandung:Nusa Media.

Erwin Dwi Kristianto.2014. *UU NO. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*

Pasca Putusan Mahkamah Kontitusi.Perkumpulan Untuk

Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat (HuMa):Jakarta.

Elza Syarif. 2012. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus*

Pertanahan. .Jakarta: Kompas Gramedia

Feri Amsari . 2011. *Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jimly Asshiddiqie.2010. *Konstitusi Ekonomi*,Jakarta:Kompas

Koalisi Untuk Perubahan Kebijakan Kehutanan (KPKK).2007. *Analisa Teks*

dan Dampak-Dampak Pemberlakuan Undang-Undang No. 41

Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Jakarta

Konsersium Pembaruan Agraria.2012. *Terkuburnya Keadilan Agraria Bagi Rakyat Melalui Reforma Agraria, Laporan Akhir Tahun.*
Jakarta.

Myrna A Safitri. 2011. *Masa Depan Hak-Hak Komunal Atas Tanah:*

Beberapa Gagasan Untuk Pengakuan Hukum.

VanVollenhoven Institute, Universitas Leiden-BAPPENAS RI.

----- 2011. *Untuk Apa Pluralisme Hukum.* Epistema Insitutue, Huma,
FPP: Jakarta.

Myrna A. Safitri dan Luluk Uliyah. 2014. *Adat di Tangan Pemerintah Daerah.* Epistema Insitutue: Jakarta.

Noer Fauzi Rachman. 2014. *Masyarakat Hukum Adat adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum, dan Pemilik Wilayah Adatnya.*
InsistPress: Yogyakarta

Owen J.Lynch dan Emily Harwell.2012. *Sumberdaya Milik Siapa .*Studio
Kendil:Bogor.

Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum.* Jakarta : Kencana

Pokja Timbalun. 2014. *Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal.* Arifha:
Padang

Rikardo Simarmata. *Pluralisme Hukum dan Isu-isu yang menyertainya.*Perkumpulan Huma Indoonesia: Jakarta.

Salim.H.S 2003. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan.* Sinar Grafika: Jakarta.

Sekretariat Mahkamah Konstitusi. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*.

MKRI: Jakarta.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta

Soetandyo Wignjosoebroto. 2013. *Hukum Dalam Masyarakat*. Graha Ilmu: Jakarta

Supardi. 2011. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan*. Sinar Grafika : Jakarta

Upik Djalins dan Noer Fauzi Rachman. Dalam Cornelis Van Vollenhoven. *Orang Indonesia dan Tanahnya*. STPN Press: Yogyakarta.

Urip Santoso. 2013. *Hukum Agraria*. Jakarta: Kencana.

Widiyanto. 2013. *Tragisme Desa di Kawasan Hutan Menuntut Penyelesaian; Catatan Pengantar tentang Potret Sosial Desa Hutan untuk model Penyelesaian Konflik Tenurial. Dalam Menuju Penyelesaian Konflik Tenurial Kehutanan*. Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum berbasis Ekologis (HuMa)

Yance Arizona. 2014. *Konstitusionalisme Agraria*. Yogyakarta : STPN Press.

Yance Arizona, dkk. 2014. *Kembalikan Hutan Kepada Masyarakat Hukum Adat*. Perkumpulan HuMa Indonesia. Episetema Institutue, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Jakarta

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Peraturan-Peraturan Pokok
Kehutanan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Pengrusakan Hutan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU

Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa



Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Putusan Mahkamah Konstitusi No 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Putusan Mahkamah Konstitusi No 45/PUU-IX/2011 tentang Pengujian

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.89/Menhut-II/2014 tentang Hutan Desa

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala BPN Peraturan Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-II/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, Nomor 8/SKB/X/2014.



Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.

III. Jurnal , Makalah, Paper dan Koran

Buletin Intip Hutan, Media Informasi Seputar Hutan Indonesia. Edisi Februari 2015

Jurnal Agenda 21 Indonesia.1996. *Strategi Nasional Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Jakarta.

Koran Tempo. Hutan Adat Untuk Kesejahteraan Masyarakat. Inforial Edisi 1 oktober 2014

Kurnia Warman.2009. *Kedudukan Hukum Adat Dalam Realitas Pembangunan Hukum Agraria*. Jurnal Konstitusi Vol.6 Nomor 4.

Panduan Pelatihan Negosiasi Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam. 2016. Imparsial Mediator Network. Bogor

Sayuti Dt. Rajo Panghulu. 2014. *Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal dan Panduan Peyeleaian Konflik Kehutanan*. Padang.

Soetandyo Wignjosoebroto .*Masalah Budaya Dalam Pembentukan Hukum Nasional*. Jakarta

Yance Arizona. *Hak Ulayat Pendekatan Hak Asasi Manusia dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jurnal Konstitusi Vol 6 Nomor 2

IV. Internet

http://www.dephut.go.id/files/Statistik_Kehutanan_2008_Planologi.pdf

<Http://www.Pengertianahli.com>, Pengertian Hutan Menurut Para Ahli,

<Http://www.Pengertian-definisi>.

V. Risalah Pengadilan

Keterangan Ahli Noer Fauzi Rachman. Meralat Negaraisasi Tanah Adat.
Pengujian Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999.
Mahkamah Konsitutusi Jakarta

Keterangan Ahli Prof.Dr.Ir Hadiadi Kartodihardjo, M.S. Dalam
persidangan pengujian UU Kehutanan

Keterangan DPR Republik Indonesia Terhadap Dalil Pemohon Dalam
Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Kurnia Warman. 2015. Risalah Keterangan Ahli Pemohon persidangan
Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang



Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, Agenda Mendengarkan
Keterangan Ahli Pemohon.

